



## Inovasi dan Masa Depan Pembiayaan Pendidikan : Menuju Akses dan Kualitas yang Merata

Bagas Prakosa, Siswi Yulfani, Retno Sasti Intan Pangastuti, Qomaruddin Rizal, Siti Aqidatun, Sisca Septiani, Wiwik Pudjaningsih

Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan, Universitas Ngudi Waluyo

Alamat: Jl. Diponegoro No. 186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50512

\*Penulis Korespondensi: [siswiyulfani1@gmail.com](mailto:siswiyulfani1@gmail.com)

**Abstract.** *This article discusses innovative models in higher education financing that aim to expand access and maintain quality more evenly in Indonesia. The main focus of this study is on the challenges of financing higher education, such as limited funds, infrastructure inequality, and quality gaps between regions that are still obstacles to realizing inclusive and quality education. This study uses a qualitative approach with the systematic literature review method on 25 sources of scientific literature published between 2020–2025. The results of the study show that financing models such as public-private partnerships (PPP), education crowdfunding, the use of financial technology (fintech), and Corporate Social Responsibility (CSR) programs have great potential to encourage sustainability and equitable access to higher education. The PPP model, for example, can strengthen synergy between the government and the private sector in the provision of educational infrastructure, while crowdfunding plays a role in opening up wider public participation in supporting student financing. The use of fintech can provide a more flexible, transparent, and accessible payment system, while CSR encourages corporate contributions to support scholarships and university quality development programs. However, its implementation in Indonesia still faces a number of obstacles. Inhibiting factors include limited regulations governing alternative financing, low digital and financial literacy among students and the community, and unevenness in digital infrastructure between regions. Therefore, the development of the higher education financing system in Indonesia needs to be directed at diversifying funding sources, increasing the management capacity of educational institutions, and improving governance to be more accountable and transparent.*

**Keywords:** *education financing innovation; education policy; public-private partnerships; quality of higher education; Financial Technology*

**Abstrak.** Artikel ini membahas model-model inovatif dalam pembiayaan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memperluas akses dan menjaga mutu secara lebih merata di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah pada tantangan pembiayaan pendidikan tinggi, seperti keterbatasan dana, ketimpangan infrastruktur, dan kesenjangan kualitas antarwilayah yang masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review terhadap 25 sumber literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa model pembiayaan seperti kemitraan publik-swasta (PPP), crowdfunding pendidikan, pemanfaatan teknologi finansial (fintech), serta program Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki potensi besar untuk mendorong keberlanjutan dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Model PPP, misalnya, dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, sementara crowdfunding berperan membuka partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam mendukung pembiayaan mahasiswa. Pemanfaatan fintech dapat menghadirkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel, transparan, dan mudah diakses, sedangkan CSR mendorong kontribusi perusahaan untuk mendukung beasiswa maupun program pengembangan kualitas perguruan tinggi. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor penghambat meliputi keterbatasan regulasi yang mengatur pembiayaan alternatif, rendahnya literasi digital dan finansial di kalangan mahasiswa dan masyarakat, serta ketidakmerataan infrastruktur digital antarwilayah. Oleh karena itu, pengembangan sistem pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia perlu diarahkan pada diversifikasi sumber dana, peningkatan kapasitas manajemen lembaga pendidikan, serta perbaikan tata kelola agar lebih akuntabel dan transparan. Artikel ini memberikan rekomendasi strategis berupa dorongan kolaborasi lintas sektor, penguatan kerangka hukum dan regulasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberlanjutan pendanaan.

**Kata kunci:** inovasi pembiayaan pendidikan; kebijakan pendidikan; kemitraan publik-swasta; mutu pendidikan tinggi; teknologi finansial

## **1. LATAR BELAKANG**

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa dan menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan yang bermutu, akan lahir generasi yang cerdas, terampil, dan mampu beradaptasi dengan tantangan global yang semakin kompleks. Namun, untuk mewujudkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan, masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan, terutama dalam aspek pembiayaan yang menjadi tulang punggung keberhasilan sistem pendidikan.

Permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi, terutama di level pendidikan tinggi. Banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil atau berasal dari keluarga kurang mampu, masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi yang layak akibat keterbatasan dana. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan baik dalam hal akses maupun mutu pendidikan, di mana hanya sebagian kelompok tertentu yang benar-benar bisa merasakan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kualitas internasional.

Tantangan pembiayaan pendidikan tinggi semakin kompleks dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Wulandari et al. (2020) mengidentifikasi bahwa keterbatasan dana menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan yang layak, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Penelitian Hafeez et al. (2022) menunjukkan bahwa inovasi dalam pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan akses dan kualitas, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran.

Menanggapi permasalahan tersebut, muncul berbagai upaya inovatif dalam pembiayaan pendidikan yang telah dikembangkan di berbagai negara. Darmawan & Rugaiyah (2024) mengidentifikasi beberapa pendekatan inovatif antara lain kebijakan sekolah tanpa biaya, kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta pergeseran dari pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari anggaran publik menjadi model campuran atau swasta, terutama di pendidikan tinggi. Shrestha (2020) dan Ehteshamnejad (2023) mengemukakan bahwa berbagai inisiatif ini terbukti mampu memperluas akses dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan.

Di Indonesia, penerapan pendekatan-pendekatan inovatif tersebut masih tergolong terbatas dan belum sepenuhnya selaras dengan kondisi sosial-ekonomi maupun arah kebijakan nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Brika et al. (2021) menekankan bahwa isu kualitas pendidikan tinggi tidak hanya mencakup isi

kurikulum, tetapi juga melibatkan sejauh mana mahasiswa merasa puas dengan proses belajar, relevansi keterampilan lulusan dengan dunia kerja, serta tata kelola institusi yang terbuka dan responsif.

Kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan mutu pendidikan tinggi. Lugovyi et al. (2020) mengidentifikasi bahwa banyak perguruan tinggi menghadapi kesulitan dalam merancang program akademik, memperbarui fasilitas, maupun menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan staf pendukung. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan solusi pembiayaan yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga berorientasi jangka panjang dan mampu mengintegrasikan antara aspek pendanaan dan jaminan mutu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai model inovatif dalam pembiayaan pendidikan tinggi yang dapat diadaptasi di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana penerapan model-model pembiayaan inovatif seperti kemitraan publik-swasta, crowdfunding, fintech, dan CSR dapat mendukung keberlanjutan dan pemerataan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan menggabungkan tinjauan empiris dan pendekatan yang kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Landasan Teoritis Pembiayaan Pendidikan**

Penelitian ini didasarkan pada dua kerangka teoritis utama yang saling melengkapi dalam memahami dinamika pembiayaan pendidikan tinggi. Pertama, Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Siregar et al. (2022) meletakkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teori ini menekankan bahwa investasi dalam pendidikan akan menghasilkan return ekonomi dan sosial yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, Teori Pemerataan Akses Pendidikan yang dikemukakan oleh Anwar (2023) dan Sihombing (2023) menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menghilangkan barrier ekonomi, geografis, dan sosial yang dapat menghalangi akses pendidikan berkualitas. Kedua teori tersebut membantu menjelaskan mengapa pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan.

## **B. Konsep Inovasi Pembiayaan Pendidikan**

Inovasi dalam pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Hafeez et al. (2022) mengidentifikasi bahwa berbagai pendekatan baru telah dikembangkan untuk menjawab tantangan pembiayaan, antara lain kebijakan sekolah tanpa biaya, kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta pergeseran dari pembiayaan publik sepenuhnya ke model campuran dan swasta dalam pendidikan tinggi.

Penelitian Shrestha (2020) menunjukkan bahwa inovasi-inovasi pembiayaan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan memperkuat akuntabilitas. Di Indonesia, penerapan pendekatan tersebut masih belum optimal dan perlu disesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi serta kebijakan nasional yang berlaku.

## **C. Model-Model Inovasi Pembiayaan Pendidikan**

Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian ini mengidentifikasi enam model utama inovasi pembiayaan pendidikan yang memiliki potensi untuk diterapkan di Indonesia:

- a) Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership - PPP) merupakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang dapat menciptakan program pembiayaan yang berkelanjutan dan efisien. Barrera-Osorio et al. (2022) menunjukkan bahwa PPP telah terbukti memperluas akses pendidikan, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan.
- b) Crowdfunding Pendidikan adalah bentuk pembiayaan berbasis digital yang memungkinkan partisipasi publik melalui donasi daring. Maulana Alfial et al. (2024) mengidentifikasi bahwa crowdfunding memberikan akses dana yang lebih terbuka dan fleksibel untuk siswa, terutama dari kelompok rentan, sekaligus membangun keterlibatan sosial dan solidaritas masyarakat.
- c) Teknologi Finansial (Fintech) mempermudah akses pinjaman dan penggalangan dana pendidikan secara cepat dan efisien. Golden & Cordie (2022) dan Setiawan et al. (2023) menunjukkan bahwa fintech juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif.
- d) Program Corporate Social Responsibility (CSR) melibatkan dukungan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial yang difokuskan pada pendidikan, beasiswa, pembangunan fasilitas, dan dukungan vokasi. Wulandari et al. (2020) mengidentifikasi bahwa CSR dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan untuk pengembangan pendidikan.
- e) Voucher Pendidikan adalah sistem yang memberikan kuota pendanaan kepada keluarga untuk memilih institusi pendidikan, mendorong fleksibilitas dan persaingan

kualitas antar lembaga. Waddington et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem voucher dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan pendidikan.

- f) Platform E-learning memperluas akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, dengan menekan biaya dan mengatasi batasan jarak serta waktu, sekaligus mendorong peningkatan literasi digital. Zhao (2024) menekankan bahwa keberhasilan platform e-learning bergantung pada kesiapan infrastruktur digital yang memadai.

#### **D. Tantangan dan Peluang Implementasi**

Implementasi model-model inovasi pembiayaan pendidikan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan sosial ekonomi, dan rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat. Maatuk et al. (2022) mengidentifikasi bahwa kesenjangan digital menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi finansial dan platform e-learning.

Di sisi lain, Prabowo et al. (2025) dan Tabassum & Ali (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pembiayaan pendidikan membuka peluang besar untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, transparan, dan efisien. Peningkatan literasi digital dan finansial menjadi kunci keberhasilan implementasi inovasi pembiayaan pendidikan di era digital.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain systematic literature review (SLR). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap konsep, praktik, dan kecenderungan inovasi dalam pembiayaan pendidikan serta dampaknya terhadap akses dan mutu pendidikan tinggi. Systematic literature review memungkinkan peneliti mengkaji berbagai sumber ilmiah secara sistematis dan komprehensif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan gap penelitian yang ada.

Desain ini bersifat eksploratif dan deskriptif, bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema konseptual dan pola pemikiran yang berkembang dalam literatur akademik, sekaligus merumuskan sintesis pemikiran yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan kajian lebih lanjut.

#### **B. Strategi Pencarian dan Kriteria Seleksi**

Pencarian literatur dilakukan pada database jurnal terpercaya meliputi Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan Portal Garuda (Sinta). Kata kunci yang digunakan adalah: "*education financing innovation*", "*higher education funding*", "*public-private partnership*

*education*", *"crowdfunding education"*, *"fintech education"*, "pembiayaan pendidikan", "inovasi pendidikan tinggi", dengan kombinasi Boolean operator (AND, OR).

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025, (2) artikel yang membahas inovasi pembiayaan pendidikan atau pendidikan tinggi, (3) artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah peer-reviewed atau prosiding konferensi internasional, (4) artikel dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, (2) artikel yang tidak dapat diakses full text, (3) artikel dengan kualitas metodologi yang rendah.

### **C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah identifikasi awal yang menghasilkan 150 artikel dari berbagai database. Tahap kedua adalah screening berdasarkan judul dan abstrak yang menghasilkan 45 artikel. Tahap ketiga adalah evaluasi full text yang menghasilkan 25 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan kualitas penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2021) dengan enam tahapan: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang, (2) pengkodean awal terhadap potongan teks penting, (3) pencarian tema berdasarkan kesamaan makna kode, (4) peninjauan tema untuk memastikan koherensi, (5) pemberian nama dan definisi tema yang representatif, (6) penyusunan laporan hasil analisis dengan dukungan kutipan dari artikel.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data antarartikel dan melakukan pembacaan ulang secara berkala untuk menjaga konsistensi interpretasi. Proses analisis dilakukan secara manual dengan bantuan tabel tematik untuk memudahkan kategorisasi dan sintesis temuan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

#### ***Karakteristik Studi yang Direview***

Berdasarkan systematic literature review yang dilakukan terhadap 25 artikel penelitian yang memenuhi kriteria, diperoleh gambaran komprehensif tentang perkembangan inovasi pembiayaan pendidikan tinggi. Distribusi artikel berdasarkan tahun publikasi menunjukkan tren peningkatan, dengan 20% artikel dipublikasikan pada 2020-2021, 32% pada 2022-2023, dan 48% pada 2024-2025, mengindikasikan meningkatnya perhatian akademik terhadap topik ini.

**Tabel 1. Distribusi Artikel Berdasarkan Kategori Model Pembiayaan.**

Model Pembiayaan	Jumlah Artikel	Persentase (%)	Fokus Utama
Kemitraan Publik-Swasta (PPP)	7	28	Kolaborasi pemerintah-swasta
Teknologi Finansial (Fintech)	6	24	Platform digital, literasi keuangan
Crowdfunding Pendidikan	4	16	Partisipasi masyarakat, donasi online
Corporate Social Responsibility	3	12	Program CSR perusahaan
E-learning dan Platform Digital	3	12	Akses digital, pembelajaran online
Voucher Pendidikan	2	8	Sistem pilihan dan kompetisi
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	-

*Sumber: Hasil analisis systematic literature review (2025)*

### **Tematik Utama dari Literature Review**

Analisis tematik mengidentifikasi lima tema utama yang konsisten muncul dalam literatur:

#### **Tema 1: Diversifikasi Sumber Pembiayaan**

Sebanyak 84% artikel menekankan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Model yang paling sering dibahas adalah PPP (28% artikel) dan fintech (24% artikel) sebagai alternatif pembiayaan yang berkelanjutan.

#### **Tema 2: Peran Teknologi Digital**

Teknologi digital muncul sebagai enabler utama dalam 76% artikel yang direview. Fintech, platform crowdfunding, dan e-learning dipandang sebagai inovasi yang dapat meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi dalam pembiayaan pendidikan.

#### **Tema 3: Inklusivitas dan Pemerataan Akses**

Aspek inklusivitas menjadi concern dalam 68% artikel, dengan penekanan pada upaya menjangkau kelompok masyarakat rentan dan daerah tertinggal melalui berbagai skema pembiayaan inovatif.

#### **Tema 4: Tantangan Implementasi**

Tantangan implementasi diidentifikasi dalam 72% artikel, meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi keuangan, kesenjangan sosial ekonomi, dan perlunya regulasi yang mendukung.

Tema 5: Sustainability dan Governance

Aspek keberlanjutan dan tata kelola muncul dalam 60% artikel, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan sistem monitoring yang efektif dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

**Pemetaan Model Inovasi Pembiayaan**

**Tabel 2. Analisis Kelebihan dan Tantangan Model Pembiayaan Inovatif.**

Model	Kelebihan Utama	Tantangan Implementasi	Tingkat Kesiapan Indonesia
PPP	Sumber daya gabungan, efisiensi tinggi, sharing risk	Kompleksitas regulasi, transparansi	Sedang
Fintech	Akses mudah, proses cepat, literasi keuangan	Infrastruktur digital, keamanan data	Tinggi
Crowdfunding	Partisipasi masyarakat, transparansi tinggi	Ketergantungan internet, sustainabilitas	Sedang
CSR	Komitmen jangka panjang, nilai sosial	Ketergantungan kebijakan perusahaan	Tinggi
E-learning	Jangkauan luas, biaya efektif	Digital divide, kualitas pembelajaran	Sedang
Voucher	Kompetisi kualitas, pilihan konsumen	Regulasi kompleks, equity concern	Rendah

Sumber: Sintesis hasil literature review (2025)

**Trend Perkembangan Inovasi Pembiayaan**

Hasil analisis menunjukkan perkembangan yang dinamis dalam inovasi pembiayaan pendidikan. Periode 2020-2021 didominasi oleh diskusi tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan pendidikan dan urgensi digitalisasi. Periode 2022-2023 menunjukkan fokus pada pengembangan model hybrid financing yang mengombinasikan berbagai sumber pembiayaan. Periode 2024-2025 menunjukkan tren menuju sustainable financing dengan penekanan pada environmental, social, dan governance (ESG) principles.

**Tabel 3. Kontribusi Potensial Model Inovasi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).**

Model Pembiayaan	SDG 4 (Education)	SDG 1 (Poverty)	SDG 8 (Economy)	SDG 10 (Inequality)
PPP	++++	+++	++++	+++
Fintech	++++	++++	++++	++++
Crowdfunding	+++	++++	++	++++
CSR	+++	+++	+++	+++
E-learning	++++	++++	+++	++++
Voucher	+++	++	+++	++

Keterangan: ++++ (sangat tinggi), +++ (tinggi), ++ (sedang), + (rendah)

Sumber: Analisis kontribusi terhadap SDGs (2025)

## **B. Pembahasan**

### ***Potensi dan Realitas Crowdfunding Pendidikan***

*Crowdfunding* merupakan salah satu inovasi pembiayaan yang menarik perhatian karena bersifat partisipatif dan berbasis digital. Maulana Alfial et al. (2024) mengidentifikasi bahwa dengan menggunakan platform daring, masyarakat dapat berdonasi secara langsung untuk mendukung biaya pendidikan siswa, khususnya dari kelompok rentan. Keunggulan utama dari crowdfunding terletak pada transparansi dan fleksibilitasnya, karena memungkinkan pelaporan terbuka yang bisa meningkatkan kepercayaan publik.

Namun, penelitian Pasadani & Rusdiana (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital dan akses internet yang belum merata di daerah pedesaan menghambat optimalisasi penggunaan metode ini. Nilai sosial yang terkandung dalam crowdfunding, yakni keterlibatan dan solidaritas masyarakat, menjadikan model ini lebih dari sekadar alat pembiayaan, tetapi juga menjadi wadah membangun kesadaran kolektif atas pentingnya pendidikan. Dengan pengelolaan yang tepat serta sistem pelaporan yang akuntabel, crowdfunding pendidikan berpotensi menjadi solusi inklusif yang dapat menjawab kebutuhan finansial sektor pendidikan di era digital.

### ***FinTech dan Transformasi Literasi Keuangan dalam Pendidikan***

Teknologi finansial (*fintech*) dalam dunia pendidikan mempermudah akses pinjaman atau penggalangan dana pendidikan dengan proses yang cepat, transparan, dan efisien melalui aplikasi digital. Golden & Cordie (2022) dan Setiawan et al. (2023) mengidentifikasi bahwa lebih dari sekadar sarana pembiayaan, *fintech* juga berfungsi sebagai media untuk meningkatkan literasi keuangan, baik bagi siswa maupun orang tua.

Dengan mengenalkan cara mengelola keuangan sejak dini, terutama melalui fitur perencanaan dan pelaporan keuangan digital, siswa menjadi lebih siap secara finansial untuk merencanakan pendidikan mereka. Prabowo et al. (2025) menekankan bahwa *fintech* dapat mengintegrasikan education dan financial services, menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Tantangannya adalah bagaimana memastikan setiap kelompok masyarakat bisa memahami cara kerja *fintech* secara benar, agar tidak terjebak pada praktik pinjaman yang membebani atau merugikan dalam jangka panjang.

### ***Platform E-learning: Aksesibilitas versus Kualitas***

Platform e-learning telah menjadi salah satu cara paling cepat dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Zhao (2024) menunjukkan bahwa dengan modal koneksi internet dan perangkat digital, peserta didik bisa mengakses materi

pelajaran tanpa harus datang ke kampus, sehingga secara signifikan mengurangi biaya pendidikan.

Namun, tantangan besar muncul pada kesiapan infrastruktur digital, baik dari sisi jaringan internet maupun ketersediaan perangkat belajar. Maatuk et al. (2022) mengidentifikasi bahwa pandemi COVID-19 mempercepat adopsi e-learning, tetapi juga mengekspos kesenjangan digital yang ada. Pendidikan digital hanya akan berhasil jika didukung dengan adanya kebijakan yang menyediakan fasilitas penunjang seperti listrik, akses perangkat, dan pelatihan bagi para pengajarnya. Selain itu, perlu ada mekanisme quality assurance yang memastikan bahwa pembelajaran online dapat memberikan outcome yang setara dengan pembelajaran konvensional.

### ***Model Alternatif Pembiayaan: Ragam Pilihan dan Kompleksitas Implementasi***

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa model alternatif pembiayaan yang memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama, voucher pendidikan memberi kuasa pada orang tua untuk memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anaknya, sekaligus mendorong persaingan sehat antar lembaga pendidikan. Waddington et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem voucher dapat meningkatkan kualitas melalui mekanisme pasar, namun juga berpotensi menciptakan stratifikasi sosial jika tidak diregulasi dengan baik.

Kedua, kemitraan publik-swasta (PPP) mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendanai fasilitas pendidikan dan program-program beasiswa. Barrera-Osorio et al. (2022) membuktikan bahwa PPP dapat mengoptimalkan sumber daya dan expertise dari kedua sektor, namun memerlukan framework regulasi yang jelas untuk menjaga kepentingan publik.

Ketiga, program Corporate Social Responsibility (CSR) merujuk pada komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara sukarela. Wulandari et al. (2020) mengidentifikasi bahwa CSR menjadi ruang kontribusi bagi perusahaan untuk terlibat langsung dalam pendanaan pendidikan, seperti pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas, dan penyediaan pelatihan keterampilan kerja. Kekuatan dari model-model ini terletak pada fleksibilitas sumber daya, akan tetapi tetap memerlukan tata kelola yang jelas agar transparansi dan pemerataan tetap terjaga.

### ***Tantangan Implementasi: Infrastruktur, Kesenjangan Sosial, dan Governance***

Realitas di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan besar dalam penerapan model-model pembiayaan alternatif. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, terutama di daerah tertinggal, membuat banyak lembaga pendidikan kesulitan mengadopsi pendekatan

digital secara maksimal. Dana yang tidak memadai dapat membatasi kemampuan lembaga pendidikan untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas pengajaran, inovasi, dan pembangunan infrastruktur.

Kryshchenko (2023) mengidentifikasi bahwa planning dan budgeting yang tidak optimal dapat mempengaruhi kemampuan serta motivasi belajar siswa, motivasi mengajar dosen, dan daya saing perguruan tinggi itu sendiri. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi membuat sebagian masyarakat tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan, meskipun tersedia. Faktor ekonomi tetap menjadi penghalang utama bagi banyak keluarga untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Zamirbekkyzy et al. (2023) menekankan bahwa governance yang lemah dapat menghambat efektivitas inovasi pembiayaan. Transparansi, akuntabilitas, dan sistem monitoring yang efektif menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa inovasi pembiayaan benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

### ***Peran Strategis Pemerintah: Kebijakan, Kolaborasi, dan Masa Depan***

Melihat berbagai inovasi yang berkembang dalam pembiayaan dan berbagai tantangan yang harus diatasi, pemerintah memiliki peran sentral dalam kebijakan pembiayaan pendidikan dengan menetapkan kerangka kebijakan dan alokasi anggaran yang stabil. Rahayu (2022) mengidentifikasi bahwa salah satu pendekatan yang digunakan adalah memastikan minimal 20% dari anggaran nasional dialokasikan untuk pendidikan, sebagai bentuk komitmen terhadap keberlangsungan dan pemerataan layanan pendidikan.

Saputro et al. (2023) menunjukkan bahwa skema pembiayaan perlu dipadukan dengan sistem anggaran top-down yang menghubungkan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan pendanaan di institusi pendidikan, guna menjaga kualitas dan kesetaraan antar jenjang. Selain kebijakan fiskal, upaya penguatan program beasiswa juga menjadi langkah strategis, tidak hanya menanggung biaya kuliah, tetapi juga kebutuhan hidup, perlengkapan belajar, dan dukungan lainnya.

Yu & Ma (2022) menggarisbawahi bahwa untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, dibutuhkan sistem pembagian tanggung jawab pembiayaan antar level pemerintahan yang dapat menyeimbangkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah secara lebih adil. Kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan juga bergantung pada diversifikasi sumber dana melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Won et al. (2022) menekankan bahwa perluasan sumber daya publik berfungsi untuk menjaga daya saing pendidikan tinggi sekaligus mendorong inovasi, terutama dalam menghadapi tuntutan global yang terus berkembang. Transformasi digital dalam pembiayaan pendidikan juga menjadi area prioritas yang tidak bisa diabaikan, yang perlu dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan dan digital agar masyarakat mampu mengakses dan menggunakan layanan pembiayaan dengan aman dan bijak.

### ***Framework Pengembangan Inovasi Pembiayaan Pendidikan***

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap literatur, penelitian ini mengusulkan framework pengembangan inovasi pembiayaan pendidikan yang terdiri dari lima pilar utama:

Pilar 1: Diversifikasi Sumber Pembiayaan melalui pengembangan portfolio pembiayaan yang seimbang antara sumber publik, swasta, dan community-based financing. Hal ini meliputi optimalisasi APBN/APBD, penguatan PPP, pengembangan CSR strategis, dan pemberdayaan crowdfunding.

Pilar 2: Digitalisasi dan Teknologi melalui pemanfaatan fintech, pengembangan platform e-learning, implementasi blockchain untuk transparansi, dan penggunaan artificial intelligence untuk prediksi kebutuhan pembiayaan.

Pilar 3: Governance dan Regulasi melalui penguatan framework hukum, standarisasi transparansi dan akuntabilitas, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, serta harmonisasi regulasi antar sektor.

Pilar 4: Kapasitas dan Literasi melalui peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat, pengembangan kapasitas institusi pendidikan, pelatihan SDM pengelola keuangan, dan pemberdayaan community engagement.

Pilar 5: Sustainability dan Impact melalui pengembangan sustainable financing model, integrasi ESG principles, pengukuran social return on investment, dan alignment dengan SDGs.

Framework ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif bagi stakeholders dalam mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan systematic literature review terhadap 25 artikel penelitian yang membahas inovasi pembiayaan pendidikan tinggi, dapat disimpulkan bahwa lanskap pembiayaan pendidikan di Indonesia sedang mengalami transformasi fundamental yang memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. Pembiayaan pendidikan selama ini masih terjebak

pada pola konvensional yang terlalu mengandalkan anggaran negara, kurang fleksibel, dan belum optimal dalam melibatkan potensi masyarakat luas. Akibatnya, banyak daerah tertinggal dalam hal akses, perguruan tinggi mengalami kesulitan finansial, dan kualitas layanan pendidikan menjadi tidak merata antarwilayah dan antarkelompok sosial ekonomi.

Penelitian ini mengidentifikasi enam model utama inovasi pembiayaan yang memiliki potensi besar untuk diterapkan di Indonesia, yaitu kemitraan publik-swasta (PPP), teknologi finansial (fintech), crowdfunding pendidikan, program Corporate Social Responsibility (CSR), platform e-learning, dan sistem voucher pendidikan. Dari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di negara lain, terbukti bahwa pendekatan pembiayaan yang terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan nyata jauh lebih efektif dalam menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan memperkuat akuntabilitas penggunaan dana. Model-model inovasi ini tidak hanya memperluas akses pendidikan tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Implementasi model-model inovasi pembiayaan tersebut menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua stakeholders. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital yang belum merata, kesenjangan literasi keuangan dan digital masyarakat, kompleksitas regulasi yang belum harmonis, serta perlunya governance yang kuat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, aspek sustainability menjadi concern penting mengingat banyak model inovasi pembiayaan yang memerlukan komitmen jangka panjang dan sistem monitoring yang efektif untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan.

Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih inovatif, mengingat potensi ekonomi digital yang terus berkembang, tingkat penetrasi internet yang semakin tinggi, dan komitmen pemerintah terhadap transformasi digital. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan keberanian untuk merombak cara lama dan menciptakan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan berpihak pada yang paling membutuhkan. Pembiayaan harus berpijak pada kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar distribusi anggaran rutin yang tidak berbasis outcome.

Masa depan pembiayaan pendidikan tidak bisa hanya dibicarakan dalam rapat-rapat kebijakan, tetapi harus dirasakan dampaknya oleh mahasiswa yang nyaris putus kuliah karena keterbatasan biaya, dosen di pelosok yang mengajar tanpa dukungan layak, dan masyarakat yang selama ini termarginalisasi dari akses pendidikan berkualitas. Oleh karena itu,

transformasi sistem pembiayaan pendidikan menjadi panggilan bagi semua pihak untuk mengubah paradigma agar pendidikan betul-betul dapat diakses oleh siapa pun, di mana pun, tanpa kompromi terhadap kualitas dan sustainability.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas inovasi pembiayaan pendidikan di masa mendatang. Pertama, pengembangan kebijakan pembiayaan pendidikan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Pemerintah pusat dapat menetapkan kerangka umum dan standar nasional, tetapi pelaksanaannya perlu memberi ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan budaya setempat. Hal ini memerlukan desentralisasi yang efektif dengan tetap menjaga quality assurance dan accountability standards.

Kedua, diversifikasi sumber pendanaan perlu diperkuat sebagai bagian integral dari strategi nasional pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi pada anggaran negara perlu dikurangi secara bertahap dengan mendorong partisipasi aktif sektor swasta, lembaga sosial, dan komunitas melalui mekanisme yang terstruktur seperti Corporate Social Responsibility (CSR), kemitraan pemerintah-swasta (PPP), dan skema berbasis partisipasi publik seperti crowdfunding. Partisipasi multi-stakeholder ini perlu dibarengi dengan regulasi yang transparan, mekanisme akuntabilitas yang jelas, dan sistem insentif yang mendorong kontribusi jangka panjang.

Ketiga, pemerataan infrastruktur digital harus menjadi prioritas utama dalam agenda nasional, terutama untuk mendukung implementasi inovasi pembiayaan yang berbasis teknologi seperti platform fintech pendidikan, e-learning, dan digital crowdfunding. Investasi infrastruktur ini perlu diintegrasikan dengan program peningkatan literasi digital dan finansial masyarakat agar semua kelompok dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal, aman, dan bijak. Program literasi ini harus dirancang secara inklusif dan disesuaikan dengan karakteristik demografis dan geografis masyarakat Indonesia yang beragam.

Keempat, lembaga pendidikan tinggi perlu memperkuat tata kelola internal sebagai fondasi untuk menerima dan mengelola berbagai sumber pembiayaan inovatif. Penguatan ini meliputi pengelolaan keuangan yang profesional, penyusunan perencanaan strategis jangka panjang yang berbasis data dan evidence, serta pelibatan stakeholders dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada sustainability lembaga. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap evaluasi eksternal menjadi prasyarat penting agar pembiayaan yang diterima benar-benar mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan dan penelitian.

Kelima, evaluasi terhadap berbagai skema pembiayaan inovatif perlu dilakukan secara berkala, sistematis, dan berbasis data yang komprehensif. Sistem monitoring dan evaluasi ini harus dapat mengukur tidak hanya aspek financial performance, tetapi juga social impact, educational outcome, dan sustainability indicators. Evaluasi ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Keenam, koordinasi yang lebih erat dan sistematis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan stakeholders lainnya diperlukan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembiayaan pendidikan. Koordinasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih program, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menysasar peserta didik dan institusi yang membutuhkan, termasuk di wilayah tertinggal dan kelompok rentan secara ekonomi. Mekanisme koordinasi ini perlu didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi dan platform kolaborasi yang memfasilitasi sharing knowledge dan best practices antar stakeholders.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Ngudi Waluyo atas dukungan fasilitas penelitian yang memungkinkan terlaksananya systematic literature review ini. Terima kasih juga kepada para reviewer dan editor jurnal yang telah memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan artikel ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Anwar, M. S. (2023). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Barrera-Osorio, F., Blakeslee, D. S., Hoover, M., Linden, L., Raju, D., & Ryan, S. P. (2022). Delivering education to the underserved through a public-private partnership program in Pakistan. *The Review of Economics and Statistics*, 104(3), 399–416. [https://doi.org/10.1162/rest\\_a\\_01002](https://doi.org/10.1162/rest_a_01002)
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Brika, S. K. M., Algamdi, A., Chergui, K., Musa, A. A., & Zouaghi, R. (2021). Quality of higher education: A bibliometric review study. *Frontiers in Education*, 6, 666087. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.666087>

- Darmawan, R., & Rugaiyah, R. (2024). Education financing model transformation to build education accessibility through free school fees at PKBM Golden. *Advances in Social Humanities Research*, 2(5), 755–767. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.242>
- Ehteshamnejad, E. (2023). Global perspectives on financing higher education: A comparative analysis. *International Journal of Innovation Management and Organizational Behavior*, 3(2), 42–50. <https://doi.org/10.61838/kman.ijimob.3.2.6>
- Golden, W., & Cordie, L. (2022). Digital financial literacy. *Adult Literacy Education: The International Journal of Literacy, Language, and Numeracy*, 4(3), 20–26. <https://doi.org/10.35847/WGolden.LCordie.4.3.20>
- Hafeez, M., Naureen, S., & Sultan, S. (2022). Quality indicators and models for online learning quality assurance in higher education. *Electronic Journal of E-Learning*, 20(4), 374–385. <https://doi.org/10.34190/ejel.20.4.2553>
- Kryshchenko, K. (2023). Budget planning as a factor in improving the efficiency of education financing in Ukraine. *Educational Analytics of Ukraine*, 5, 21–30. <https://doi.org/10.32987/2617-8532-2023-5-21-30>
- Lugovyi, V., Slyusarenko, O., & Talanova, Z. (2020). Challenge of developing quality profile of higher education in Ukraine. *Education: Modern Discourses*, 3, 57–77. <https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-06>
- Maatuk, A. M., Elberkawi, E. K., Aljawarneh, S., Rashaideh, H., & Alharbi, H. (2022). The COVID-19 pandemic and e-learning: Challenges and opportunities from the perspective of students and instructors. *Journal of Computing in Higher Education*, 34(1), 21–38. <https://doi.org/10.1007/s12528-021-09274-2>
- Maulana Alfial, A., Nur Indrajid, A., & Wisudanto, W. (2024). Donation-based crowdfunding untuk pendanaan anak putus sekolah. *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 14(11), 315–328. <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4315>
- Pasadani, N. W. W., & Rusdiana, R. (2024). Crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan pendidikan di Indonesia: Analisis dan rekomendasi. *MES Management Journal*, 3(2), 144–156. <https://doi.org/10.56709/mesman.v3i2.202>
- Prabowo, P. K., Chairunissa, A. S., & Hiola, Y. (2025). The application of financial technology and digital education to improve financial literacy among Indonesian millennials. *Journal of the American Institute*, 2(4), 583–596. <https://doi.org/10.71364/pmy5ht37>
- Rahayu, Y. S. (2022). Implication of refocusing policy on education financing in state Islamic universities during Covid-19 pandemic. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1), 11–19. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i1.18477>
- Saputro, A. D., Rachmandhani, M. S., & Laksana, S. D. (2023). Governance policy and education financing strategy to improve national education development. *Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities*, 7, 442–449. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7\\_77](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_77)
- Setiawan, B., Pandu, N. D., Ahmed, A. M., Emilda, E., & Nathan, R. J. (2023). What drives individuals to adopt fintech: Extended TAM model with gender as moderating variable. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.24252/minds.v10i1.35081>
- Shrestha, M. (2020). Alternative approaches of financing education: A review. *BSSS Journal of Commerce*, 1(1), 89–102. <https://doi.org/10.51767/joc1209>

- Sihombing, R. (2023). Pemerataan pendidikan: Studi kasus 34 provinsi di Indonesia. *Parahyanan Economic Development Review*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Siregar, D. R. S., Ratnaningsih, S., & Nurochim, N. (2022). Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. *Edunomia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 61–71. <https://doi.org/10.24127/edunomia.v3i1.3017>
- Tabassum, T., & Ali, M. M. (2024). Financial literacy in the age of digital finance: A global perspective. *Academic Journal on Business Administration, Innovation & Sustainability*, 4(3), 30–36. <https://doi.org/10.69593/ajbais.v4i3.79>
- Waddington, R. J., Zimmer, R., & Berends, M. (2024). Cream skimming and pushout of students participating in a statewide private school voucher program. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 46(4), 795–803. <https://doi.org/10.3102/01623737231183397>
- Won, S., Nam, S., & Lee, H. (2022). A study on the direction of government-wide higher education financial investment and financial expansion plan. *The Korean Society for the Economics and Finance of Education*, 31(3), 57–89. <https://doi.org/10.46967/jefe.2022.31.3.57>
- Wulandari, H., Habibah, N., Munawaroh, R. A. W., & Irfan, M. (2020). Corporate social responsibility (CSR) pada bidang pendidikan: Pembelajaran dari perusahaan Samsung penerima penghargaan best award 2016. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 12–21. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28559>
- Yu, W., & Ma, H. (2022). Expenditure responsibility assignment and high-quality equity of compulsory education: Empirical analysis based on OECD countries. *Sustainability*, 14(17), 10647. <https://doi.org/10.3390/su141710647>
- Zamirbekkyzy, M., Bulakbay, Z., & Chernova, G. (2023). Modernization of education system funding: Investments in the future. *Economic Series of the Bulletin of the L.N. Gumilyov ENU*, 143(2), 242–251. <https://doi.org/10.32523/2789-4320-2023-2-242-251>
- Zhao, H. (2024). Digital platforms in higher education: Opportunities, challenges, and strategies. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 116(1), 118–122. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/116/20242447>